

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Status Hukum *Bitcoin* Sebagai Alat Transaksi

1. Sistem *Cryptocurrency* pada *Bitcoin*

Awal mula *Cryptocurrency* diawali dengan munculnya dua alat transaksi virtual yaitu *Bitgold* dan *Digicash* namun tidak mendapatkan banyak respon yang menggunakan, karena ketidakberhasilannya yang tidak mempunyai sistem yang dapat menjamin kedua *Cryptocurrency* tersebut bebas dari peretasan dan penipuan akibat tidak adanya pusat data dan sistem pengawasan yang kuat.¹ Satoshi Nakamoto seseorang/beberapa orang tokoh anonim yang tidak dikenal dan sengaja menyembunyikan identitasnya menciptakan suatu sistem baru yang mengawali perkembangan *Cryptocurrency* yang mempunyai sistem keamanan lebih baik sebagai program dasar yang dinamakan *Bitcoin*. Kemudian secara bersama-sama komunitas pengguna internet mengembangkan program dasar tersebut, meskipun program dasar tersebut dibuat oleh tokoh anonim, namun pembuatnya kehilangan kuasa untuk merubah atau mengutak-atik sistemnya, karena sistem yang bersifat *Bidirectional / peer to peer*.² *Cryptocurrency* memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara langsung tanpa adanya pihak ketiga atau campur tangan

¹ Drainville, Danielle, *An Analysis of the Bitcoin Electronic Cash System*, University of Waterloo, 2012, hlm 5

² Yuliana, Anastasya dan Prasetyo, Herry, **Gemerincing *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran**, 13 Februari 2014 <http://keuangan.kontan.co.id/news/gemerincing-bitcoin-sebagai-alat-pembayaran> diakses pada tanggal 5 desember 2017 pukul 3.34 WIB

pihak lain karena bekerja menggunakan sistem yang dinamakan kriptografi. Transaksi *bitcoin* memakai enkripsi kunci publik guna memastikan privasi, enkripsi ini menghasilkan dua kunci yang bersifat matematis. Sistem dimana satu kunci dimiliki pengirim yang berbentuk kata kunci atau kode akses yang berguna untuk mengakses *bitcoin* yang disimpan di akunnya dan kunci publik berguna untuk mengetahui lokasi akun, kunci publik digunakan pengirim untuk mengetahui lokasi akun penerima, untuk mengakses akun diperlukan kunci privat yang sesuai dengan kunci publiknya, selanjutnya pengirim menggunakan kunci privat sebagai persetujuan untuk memindahkan *bitcoin* ke akun lain. Setiap transaksi selalu terkait dengan sebuah kunci publik yang dapat disiarkan keseluruh pengguna *bitcoin*. Karena enkripsi publik yang begitu rumit, untuk meretas transaksi ini memerlukan pemrosesan yang susah melebihi dari seluruh jaringan akun digabungkan.³

Cryptocurrency berusaha memecahkan permasalahan uang virtual yang tidak berhasil sebelumnya dengan memberi ruang untuk publik dapat berpartisipasi. Sistem ini dapat bekerja karena peran dari partisipasi publik, publik yang menyediakan perangkat keras (*hardware*) yang menjadi sumber daya pada setiap transaksi sistem ini, sehingga setiap transaksi yang terjadi dapat diketahui oleh seluruh penyedia *hardware*. Keuntungan bagi penyedia *hardware* akan mendapatkan imbalan berupa *bitcoin* yang olehnya disediakannya perangkat keras tersebut. Proses demikian disebut dengan proses *Mining*, proses *Mining* ini bertujuan agar partisipasi publik dapat membuat transaksi berjalan lancar dan aman.

³ Plassaras, Nicholas A, *Regulating Digital Currencies: Bringing Bitcoin Within the Reach of the IMF*, *Chicago Journal of International Law*, 2013. hlm 381

Adanya proses *Minning* ini selain memberikan sumber data untuk jalannya semua sistem transaksi juga untuk membuat adanya partisipasi publik dalam transaksi agar tetap berjalan. Selain itu proses ini juga menambahkan jumlah pasokan uang virtual secara bertahap dimana nanti akan mencapai suatu total tertentu yang ditentukan. Sebagai contoh pasokan maksimal untuk *bitcoin* adalah 21 juta *bitcoin* yang dalam perkiraan akan dicapai tahun 2140.⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut jelas *Cryptocurrency* adalah sistem yang berjalan adalah sistem yang didasarkan pada partisipasi publik tanpa adanya pihak ketiga yang bersifat suprematif yang mempunyai wewenang dalam pengaturan pada mekanisme yang berjalan, demikian juga sistem ini menawarkan tingkat anonimitas yang tinggi pada setiap pengguna.

1.2 Blockchain pada Sistem Cryptocurrency

Sistem Cryptocurrency yang menggunakan sistem desentralisasi pada setiap transaksinya menggunakan mekanisme yang disebut sebagai *Blockchain* merupakan jaringan database transaksi yang tersebar di beberapa pengguna yang tetap sinkron, di mana tidak ada pemilik tunggal atau pengendali data. Database dari setiap transaksi ini bersifat terbuka sehingga memungkinkan melihat data setiap transaksi yang terjadi. Database transaksi cenderung hanya bisa ditambahkan, namun data historis tidak dapat diubah tanpa kesepakatan mayoritas dari para peserta jaringan.⁵

⁴ Yuliana, Anastasya dan Prasetyo, Herry, *loc. Cit.*

⁵ DBS Group Research, *Understanding Blockchain Technology*, DBS, 2016, hlm 05

Sehingga seluruh transaksi disiarkan ke seluruh jaringan publik, setiap bagian dari jaringan publik memiliki bukti yang tidak terbantahkan dari kepemilikan dan catatan transaksi dari setiap *Bitcoin* dan Kekuatan komputasi yang diperlukan untuk mengubah *blockchain* memastikan bahwa transaksi tidak dapat dibatalkan dan bahwa koin yang sama tidak dapat digunakan lebih dari satu kali.

1.3 Mekanisme Penentuan Nilai *Bitcoin*

Pada sebuah sistem keuangan terdapat cara-cara yang berbeda dalam penentuan atas nilai uang tersebut, pada uang komoditas nilainya akan cenderung stabil karena didasarkan pada jumlah komoditas misalkan emas, sedangkan pada sistem keuangan fiat akan memiliki nilai yang lebih fluktuatif sesuai kondisi negara yang menerbitkannya. Pada sistem *Cryptocurrency* terinspirasi pada sistem uang komoditas dalam penentuan nilainya.⁶ Nilai pada mata uang ini ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran pada suatu bursa. Bursa pada mata uang ini terbagi menjadi dua yaitu bursa yang regional misalnya <https://vip.bitcoin.co.id> dan bursa yang bersifat internasional www.itbit.com. Bursa mempunyai peran untuk menjadi perantara dari penjual dan pembeli sehingga ditemukan nilai permintaan dan nilai penawaran yang sesuai, selanjutnya akan dihitung dan ditemukan nilai dari mata uang virtual tersebut.⁷

Transaksi pada sistem *Cryptocurrency* yaitu dengan menempatkan permintaan dan penawaran, kemudian perangkat lunak (*software*) memproses dengan mempertemukan permintaan dan penawaran yang sesuai. Penawaran

⁶ Forrester, Daniel dan Solomon, Mark, *Bitcoin Exposed: Today Complete Guide to Tomorrow Currency*, Grassrootbooks, New York, 2013, hlm 61

⁷ Surda, Peter, *Economics of Bitcoin: is Bitcoin an alternative to fiat currencies and gold*, (Tesis Magister Viena University of Economics and Business), Viena, 2013, hlm 53.

dilakukan dengan menawarkan atau menjual uang virtual tersebut pada mata uang lain dengan harga minimum yang ditetapkan. Permintaan dilakukan dengan pembelian mata uang virtual dengan mata uang lain dengan maksimum yang ditetapkan. Jika harga permintaan lebih tinggi dari harga penawaran maka transaksi dapat dilakukan. Umumnya bursa mata uang virtual menggunakan *web browser* standar bursa, dengan koneksi SSL.⁸

Transaksi dalam bursa *Bitcoin* berdasarkan spekulasi membuat nilainya menjadi tidak stabil atau sangat fluktuatif. Mata uang harusnya bernilai stabil, namun sifat desentralisasi dimana ada peranan publik yang bukan merupakan pihak otoritas yang mempunyai wewenang membuat tidak dapat terjaganya kestabilan nilai tersebut sehingga sulit diterima sebagai alat pembayaran. Berbeda dengan uang fiat, terdapat pihak otoritas yang mempunyai wewenang menjaga kestabilan nilai mata uang.

Disamping penentuan berdasarkan bursa tersebut, pergerakan nilai mata uang ini dipengaruhi oleh inflasi dan deflasi, ada pihak yang menggunakan sistem ini dengan tujuan Investasi dengan cara mendapatkan keuntungan atas pertambahan nilai jika terjadi inflasi, berinvestasi menggunakan sistem ini dapat meningkatkan kekayaan namun hanya pada masa deflasi.⁹ Deflasi bukan merupakan pertumbuhan ekonomi namun merupakan karakteristik dari depresi ekonomi yang menjadi perangkap likuiditas bagi debitur.¹⁰ Hal ini dapat menjadikan debitur mengalami

⁸ https://en.bitcoin.it/Currency_exchange diakses pada tanggal 9 Desember 2017 pukul 2.28 WIB

⁹ Hanley, Brian P, *The False Premises and Promises of Bitcoin*, 2013, hlm 17

¹⁰ Orphanides, Athanasios, *Monetary Policy in Deflation: The Liquidity Trap in History and Practice*, Massachusetts Institute of Technology, 2004, hlm 22

Cash Crunch atau suatu kondisi dimana debitur tidak lagi mampu membayar tagihan mereka. Artinya bank menyita agunan untuk pinjaman, dan hal ini adalah hal yang dihindari oleh lembaga otoritas di berbagai negara berdasarkan kewenangannya.¹¹

1.4 Kriptografi dalam *Cryptocurrency*

Cryptocurrency menggunakan sistem keamanan yang dinamakan sistem kriptografi kunci publik dalam setiap transaksi, dalam sistem tersebut menggunakan kode kriptografi untuk mencegah adanya peretasan atau perubahan terhadap informasi dalam sistem. Indonesia belum mengatur tentang standar sistem kriptografi kunci publik, namun secara umum ada syarat yang harus terpenuhi, yaitu:¹²

a. Enkripsi dan Dekripsi yang efisien

Proses dari enkripsi yaitu proses yang membuat informasi tidak dapat dibaca dan dekripsi adalah proses membuka informasi yang sudah dienkripsi. Proses ini harus berjalan efisien agar data yang terkirim dapat dibaca saat enkripsi diterima.

b. Mudah untuk digunakan

Sistemnya harus mudah untuk kriptografer dalam menemukan kunci (*key*) pada informasi yang telah terenkripsi

c. Keamanan dari sistem harus didasarkan kerahasiaan pada kunci (*keys*) dan bukan kerahasiaan dari algoritma

¹¹ Hanley, Brian P, *op. Cit*, hlm 17

¹² Robling Denning, Dorothy Elizabeth, *Cryptography and data security*, Addison-Wesley Longman Publishing, Canada, 2016, hlm 10

Dasar kerahasiaan keamanan bukan berdasar algoritma yang memungkinkan diketahui rahasianya dengan memecahkan kode algoritma, ini penting karena data transaksi pada sistem ini ada pada ranah publik.

Syarat-syarat tersebut adalah syarat minimal yang harus dipenuhi dalam sistem kriptografi yang bertujuan untuk keamanan dalam melindungi informasi, informasi yang dimaksud adalah informasi yang berkaitan dengan kegiatan transaksi, disamping itu juga memberikan kerahasiaan identitas pengguna dan mencegah modifikasi terhadap sistem mata uang virtual. Kriptografi memberikan kerahasiaan dari segala aspek sehingga analisis kriptografi tidak dapat mengetahui sistematisasi proses kriptografi juga tidak dapat membaca isi data yang sudah terenkripsi. Sistem ini juga sebagai autentikasi data sehingga informasi yang dikirimkan terlindungi dari proses modifikasi dari pihak yang tidak berwenang.¹³

Cryptocurrency memberikan kerahasiaan dan privasi kepada para penggunanya terhadap siapapun, sehingga memungkinkan transaksi dilakukan oleh para pihak yang saling tidak mengetahui identitas aslinya, karena sifat kerahasiaan tersebut membuat *Cryptocurrency* populer dalam penggunaan transaksi yang ilegal seperti senjata api dan obat terlarang melalui *e-commerce*.¹⁴ Kerahasiaan sebagai Anonimitas dalam kriptografi memungkinkan setiap transaksi dapat dilakukan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Bort, Julie, *The Incredible Story Of A Security Blogger, Bitcoin, And 13 Packets Of Heroin Bought On The Secret Internet Black Market*, <http://www.businessinsider.com/hackers-use-silk-road-to-frame-a-blogger-2013-7/?IR=T> , Diakses pada tanggal 9 Desember 2017 pukul 4.32 WIB

dengan hanya mengetahui kunci publik pengguna yang berfungsi juga sebagai dompet virtual.¹⁵

Dengan sistem tersebut keuntungan yang menjadi daya tarik *Cryptocurrency* adalah kerahasiaan dan privasi yang diberikan dari sistem kriptografi dan kemudahan transaksi hanya dengan kunci publik untuk bertransaksi. Disamping itu keautentikan pada setiap transaksi akan terjaga keamanannya karena setiap transaksi harus ditandatangani secara digital melalui kunci privat yang hanya diketahui oleh pengguna yang berhak.

2. Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Pembayaran

Dewasa ini dalam perkembangannya *Bitcoin* dianggap dan digunakan sebagai alat pembayaran berbasis teknologi, baik pada transaksi yang bersifat legal maupun yang ilegal. *Bitcoin* menawarkan kecepatan dan kemudahan dalam bertransaksi lintas negara serta tingkat kerahasiaan yang tinggi sehingga membuat *Bitcoin* dalam perkembangannya banyak dipilih untuk kegiatan bertransaksi. *Bitcoin* memang bertujuan untuk menggantikan uang konvensional sebagai alat transaksi. Uang secara umum berdasarkan pendapat ahli adalah sesuatu (benda) yang diterima secara umum dalam proses pertukaran barang dan jasa.¹⁶ Syarat pertama agar sebuah benda secara teori dapat dijadikan sebagai uang adalah benda, benda disini adalah barang ekonomi (*economic good*) karena mengandung barang langka (*scarce good*) sehingga benda tersebut haruslah bersifat langka atau susah didapatkan, dalam sistem uang komoditas pengertian dari benda langka tersebut

¹⁵ Sprankel, Simon, *Technical Basis of Digital Currencies*, Technische Universitat Darmstadt, Germany, 2013, hlm 8

¹⁶ Manurung, Mandala dan Raharja, Pratama, *Op.Cit*, hlm 3

adalah logam mulia yaitu emas, sebagai benda yang berharga emas mendukung (*back up*) uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. *Bitcoin* mencoba untuk meniru pola kelangkaan pada logam mulia dimana sistem akan membatasi jumlah produksi dari uang kripto yang dihasilkan sehingga tercipta kelangkaan buatan, selain itu yang juga termasuk unsur penting yaitu mata uang ini diterima dan eksis di masyarakat untuk dijadikan sebagai alat transaksi. Sebagai contoh teoritis ketika seseorang menggunakan permen coklat untuk pertukaran barang atau jasa maka permen coklat itu menjadi mata uang diantara mereka yang bertransaksi, sehingga *Bitcoin* merupakan konsep mata uang pada tingkatan paling dasar.¹⁷

Uang pada dasarnya memiliki fungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*) yaitu seseorang dapat menukar uang secara langsung dengan produk barang atau jasa yang dikehendaki, uang juga berfungsi untuk alat penyimpanan nilai (*store value*) yaitu uang dapat dijadikan sebagai alat penyimpan kekayaan, dan yang terakhir uang sebagai alat satuan hitung (*unit of account*). Rupiah sebagai mata uang Negara Republik Indonesia memiliki ketiga fungsi tersebut, dan berdasarkan definisi yang ada pada *Blacklaw Dictionary* “*The medium of exchange authorized or adopted by a government as part of its currency*” mengartikan bahwa uang Rupiah bersifat legal.¹⁸ Indonesia telah mengatur secara khusus mengenai mata uang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dimana dalam pasal 1 butir 1 dijelaskan bahwa Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Dari kedua

¹⁷ Paul H, Farmer Jr, *Speculative Tech: The Bitcoin Legal Quagmire & the Need for Legal Innovation*, *Journal of Business & Technology Law* vol.9, 2014, hlm 93

¹⁸ Black, Henry C, *Black's Law Dictionary Fifth Edition*, West Publishing CO, Minnesota, 2009, hlm 906

definisi diatas dapat dikatakan bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai mata uang ketika disahkan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan yang sah, di Indonesia sesuai pada UU Mata Uang dinyatakan bahwa Mata Uang di Indonesia adalah Rupiah karena dikeluarkan oleh pemerintah yang sah dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia.

Bitcoin walaupun dianggap sebagai mata uang dalam masyarakat namun tidak diakui sebagai mata uang yang sah oleh pemerintah manapun.¹⁹ Karena sifat desentralisasi pada sistem mata uang ini membuat pemerintah enggan mengakuinya karena akan memunculkan kompetisi dari mata uang yang telah dibuat oleh pemerintah.²⁰ Sehingga jika *Bitcoin* dikatakan sebagai mata uang tidaklah tepat karena tidak memenuhi syarat pengakuan pemerintah, dan juga syarat-syarat umum mata uang sebagai berikut:²¹

a. Mudah dibawa (Portability)

Sebuah benda dapat dikatakan uang jika benda tersebut mudah dibawa dan disimpan, *Bitcoin* yang berbasis teknologi menjadikannya mudah dibawa dan disimpan secara virtual.

b. Tahan Lama (*durability*)

Syarat benda tersebut harus tahan lama dan tidak cepat rusak oleh waktu, karena *Bitcoin* berbentuk virtual maka menjadikannya tahan lama selama media penyimpanannya tidak rusak.

¹⁹ Project, Bitcoin, **Frequently Asked Question**, <https://bitcoin.org/en/faq>, 2009, diakses pada tanggal 13 Desember 2017 Pukul 1.22 WIB

²⁰ Paul H, Farmer Jr, *Loc. Cit*, hlm 94

²¹ Suseno, Solikin, **Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian**, Seri Kebanksentralan, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2002, hlm 4

- c. Dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil (*divisibility*)

Bitcoin bersifat virtual dalam pengolahan informasi data yang membuatnya lebih mudah untuk dapat dipecah menjadi bentuk unit-unit yang lebih kecil bahkan hingga milibit dan centibit.

- d. Dapat distandarisasi (*standarability*)

Sifatnya yang merupakan sistem informasi yang berbentuk objek virtual dan sistem yang bersifat terbuka (*open source*) membuat *Bitcoin* menjadi sulit untuk di standarisasi.

- e. Diakui (*recognizability*)

Pengakuan suatu benda untuk dapat dikatakan sebagai mata uang sangat penting, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa *Bitcoin* tidak diakui oleh negara manapun sebagai mata uang, sehingga tidak memenuhi syarat ini.

- f. Nilainya stabil (*Value Stability*)

Nilai dari *Bitcoin* ini sangat fluktuatif karena didasarkan atas besarnya jumlah permintaan dan penawaran, padahal seharusnya alat pembayaran harus memiliki nilai stabil untuk memberikan kepastian ekonomi dalam bertransaksi.

g. Jumlahnya mencukupi (*elasticity of supply*)

Sebagai alat pembayaran harus mempunyai jumlah yang cukup untuk memenuhi semua permintaan, dengan tanpa adanya lembaga otoritas yang berwenang dalam pengelolaan *Bitcoin* maka jumlah untuk memenuhi besarnya penawaran hanya bergantung atas batasan jumlah penerbitan yang telah diatur sistem itu sendiri.

Syarat-syarat yang telah disebutkan tersebut bersifat kumulatif atau harus dipenuhi sepenuhnya, sehingga bila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat tersebut maka suatu benda tidak dapat dikatakan sebagai uang. *Bitcoin* tidak memenuhi syarat pengakuan, dapat distandarisasi, bernilai stabil dan jumlah yang mencukupi, sehingga jelas bahwa *Bitcoin* tidak dapat dikatakan sebagai uang menurut teori ataupun menurut hukum. Bank Indonesia (BI) sudah memberikan penjelasan terkait penggunaan *Bitcoin*, dalam siaran persnya BI menyatakan:²²

“Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan *Bitcoin* ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya.”

Pernyataan BI terkait adanya *Bitcoin* sudah tepat, dimana salah satu tugas BI untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.²³ Dalam pasal 15

²² Jacobs, Peter, **Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya**, 6 Februari 2016, http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_160614.aspx, Diakses pada 13 Desember 2017 Pukul 2.04 WIB

²³ Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UU Bank Indonesia) dalam menjalankan tugasnya Bank Indonesia berwenang:

- a. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
- b. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya
- c. menetapkan penggunaan alat pembayaran

Dalam Penjelasan Pasal 8 UU Bank Indonesia disebutkan bahwa jasa sistem pembayaran dapat dilaksanakan oleh Bank Indonesia antara lain adalah jasa transfer dana nilai besar. Adapun persetujuan terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dimaksudkan agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran oleh pihak lain memenuhi persyaratan, khususnya persyaratan keamanan dan efisiensi dan penetapan penggunaan alat pembayaran dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna. Dalam wewenang ini termasuk membatasi penggunaan alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehati-hatian. Berdasarkan hal tersebut Bank Indonesia sudah benar dalam melaksanakan kewenangannya dalam menyatakan bahwa *Bitcoin* tidak sah sebagai alat pembayaran di Indonesia namun jika dikaitkan kewenangan Bank Indonesia untuk membatasi penggunaan alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehati-hatian, Bank Indonesia dapat secara tegas untuk melarang penggunaan dan peredaran *Bitcoin* di Indonesia.

Bitcoin sebagai alat transaksi dalam sistem *Cryptocurrency* sering dikaitkan atau disamaartikan dengan uang elektronik, namun anggapan seperti ini juga tidak

tepat, selain tidak memiliki sifat sebagai mata uang konvensional, *Bitcoin* juga tidak tepat dikatakan sebagai mata uang elektronik. Pasal 1 butir 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik menjelaskan mengenai unsur-unsur uang elektronik, yaitu diantaranya:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagai mana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Salah satu unsur untuk suatu dapat dikatakan sebagai uang elektronik yaitu harus diterbitkan berdasarkan uang konvensional yang sah yang disetorkan terlebih dahulu, sedangkan berbeda pada *Bitcoin* yang diciptakan oleh proses *minning* berdasarkan algoritma komputer yang tidak ada kaitannya dengan uang konvensional yang disetorkan terlebih dahulu oleh penggunaanya, sehingga *Cryptocurrency* tidak juga memenuhi unsur-unsur yang ada dalam uang elektronik.

3. *Bitcoin* Sebagai Alat Transaksi Tukar Menukar / Barter

Selain dikatakan sebagai uang *Bitcoin* juga sering disebut sebagai komoditas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia komoditas adalah dagangan utama, benda niaga. Sedangkan menurut *Blacklaw Dictionary* komoditas atau *commodity* adalah:²⁴

- a. *An article of trade or commerce. The term embraces only tangible goods, such as products or merchandise, as distinguished from services*
- b. *An economic good, esp. A raw material or an agricultural product.*

Dari defenisi tersebut komoditas merupakan sebuah barang yang diperdagangkan dalam kegiatan ekonomi, sehingga untuk menentukan apakah *Bitcoin* adalah komoditas harus ditentukan terlebih dahulu apakah *Bitcoin* merupakan barang atau tidak. Benda virtual merupakan benda yang bersifat tidak berwujud dan eksklusif.²⁵ Sebuah benda virtual tidak memiliki wujud karena hanya merupakan serangkaian program komputer yang berada dalam sistem jaringan komputer, meskipun hanya dalam sebuah jaringan komputer, sebuah program atau data komputer yang dikategorikan sebagai benda digital memiliki sifat-sifat yang mirip dengan benda di dunia nyata, yaitu:²⁶

- a. Eksklusif (*Rivalrous*)

Sebuah kebendaan virtual hanya dapat dimiliki oleh satu orang saja, setiap *Bitcoin* bersifat unik yang terdiri dari kode pemograman komputer yang dikunci oleh kriptografi sehingga setiap unit *Bitcoin*

²⁴ Black, Henry C, *Op. Cit.* hlm.248.

²⁵ Manurung, Mandala dan Raharja, Pratama, *Op. Cit.*, hal 3

²⁶ Manurung, Mandala dan Raharja, Pratama, *Op. Cit.*, hal 56

berbeda dengan unit *Bitcoin* lainnya, lalu *Bitcoin* hanya dapat diakses secara sah oleh pemiliknya karena dilindungi oleh kunci privat, selain itu *Bitcoin* dapat disimpan kedalam perangkat elektronik pemiliknya sehingga *Bitcoin* hanya dapat dimiliki satu orang.

b. Tetap (*Persistence*)

Sebuah benda virtual harus bersifat tetap dan tidak berubah-ubah bentuknya, sebuah *Bitcoin* merupakan serangkaian kode pemrograman komputer yang dikunci dengan teknik kriptografi sehingga kode pemrogramannya terlindungi dan tidak dapat diubah.

c. Saling berhubungan (*Interconnected*)

Sebuah benda virtual harus saling terhubung sehingga selain pemilik, orang lain juga dapat mengakses benda tersebut sehingga pemilik dapat mempertahankan benda tersebut dari orang lain dan juga dapat memberi benda tersebut pada orang lain, *Cryptocurrency* berada dalam sistem *peer to peer* sehingga pengguna *Bitcoin* dapat saling terhubung.

Selain itu berdasarkan pendapat para sarjana unsur-unsur benda terdiri dari:²⁷

a. Dapat dikuasai manusia

Dikuasai dalam hal ini baik penguasaan secara fisik (bezit) maupun secara hak milik (eigendoom), *Bitcoin* dapat disimpan dalam perangkat elektronik dan juga dapat disimpan dalam server secara daring, selain

²⁷ Purwanta, Mahendra Adhi, **Analisa Hukum Terhadap Transaksi Atas Kebendaan Virtual Pada Penyelenggaraan Permainan Online**, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012 hlm 122

itu untuk mengakses *Bitcoin* diperlukan tanda tangan privat sehingga hanya pemilik yang dapat mengakses secara sah *Bitcoin* tersebut.

b. Dapat diraba maupun tidak

Suatu benda dapat suatu benda berwujud maupun tidak berwujud. *Bitcoin* tidak memiliki wujud fisik, *Bitcoin* hanya serangkaian program komputer yang dikunci menggunakan teknik kriptografi, yang berarti benda tersebut merupakan benda yang tidak berwujud fisik.

c. Dapat dinilai dengan uang atau setidaknya-tidaknya berharga untuk pemiliknya

Bitcoin tidak memiliki nilai intrinsik, berdasarkan hal itu sebuah *Bitcoin* hanya dianggap berharga oleh pemiliknya. Dan mempunyai nilai yang bersifat nominal.

d. Merupakan satu kesatuan serta bersifat mandiri

Bitcoin merupakan suatu data komputer yang berada dalam suatu jaringan, setiap data bersifat unik dan bersifat eksklusif untuk setiap pengguna sehingga merupakan data yang mandiri.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa *Bitcoin* memenuhi syarat-syarat sebagai suatu benda. Benda menurut pasal 504, 505 dan 506 KUHPdata terdiri dari benda bertubuh dan tidak bertubuh dan juga bergerak dan tidak bergerak, pembagian benda ini dibedakan dari sifatnya, tujuan pemakaiannya dan ditentukan oleh undang-undang.²⁸ Benda bergerak karena sifatnya adalah benda yang dapat

²⁸ Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Op. Cit, hlm 61

berpindah atau dapat dipindahkan.²⁹ *Bitcoin* dapat disimpan dalam perangkat elektronik dan server dan juga dapat dipindahtanggankan (levering) dengan mudah sehingga *Bitcoin* merupakan benda bergerak.

Sifat *Bitcoin* sebagai sebuah benda menjadikan *Bitcoin* jika digunakan dalam suatu objek perjanjian, maka perjanjian yang terjadi adalah perjanjian tukar menukar/barter. Meskipun mempunyai sistem yang menyerupai uang dalam alat transaksi pembayaran namun tidak seluruhnya memenuhi unsur sebagai mata uang, sehingga unsur yang terpenuhi adalah pada unsur benda yang merupakan perangkat elektronik berbentuk virtual yang tidak berwujud sebagai Alat Transaksi Tukar Menukar/Barter.

B. Akibat Hukum Penggunaan *Bitcoin* Terhadap Syarat Sah Perjanjian

1. *Cryptocurrency* Sebagai Sistem Elektronik

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sistem elektronik adalah:

“Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.”³⁰

Sistem dari *Cryptocurrency* bersifat *peer to peer* artinya tidak ada satu server pusat dalam sistem ini sehingga sistem ini berjalan berdasarkan sumber daya dari user yang saling terhubung. *Cryptocurrency* adalah sebuah sistem elektronik

²⁹Hasbullah, Frieda Husni, **Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan**, Indhill, Jakarta, 2002, hlm 44

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Ps.1 angka 5

yang bersifat seperti uang.³¹ *Cryptocurrency* sendiri adalah agen elektronik yang memberikan penggunanya akses pada sistem tersebut, setiap data *Cryptocurrency* merupakan fasilitator antar penggunanya untuk bertukar informasi dimana dalam hal ini informasi tersebut mirip seperti uang sehingga dijadikan sebagai alat pembayaran.

Sebuah informasi dalam sistem *Cryptocurrency* tidak secara alamiah menjadi sebuah komoditas, informasi merupakan hasil dari suatu proses (*output*) ataupun hasil dari suatu kegiatan pengolahan data yang merupakan hasil kreasi intelektualitas seseorang.³² Seorang yang memiliki suatu informasi maka sifat kepemilikan informasi tersebut akan ada padanya, Informasi tersebut kemudian digunakan dalam kegiatan ekonomi seperti menjadi alat pembayaran dan investasi, orang memperjual belikan informasi tersebut sehingga terjadi komersialisasi atas informasi tersebut. Sistem *Cryptocurrency* pada *Bitcoin* memberikan akses pada penggunanya untuk melakukan pembayaran, dalam hal ini *Bitcoin* tidak dipandang sebagai Benda ataupun uang melainkan sebagai sistem informasi yang beroperasi dengan sifat yang mirip uang, sistem yang bersifat *peer-to-peer* dan setiap unit *Bitcoin* merupakan agen elektronik yang beroperasi mewakili sistem tersebut pada pengguna, eksekusi terhadap agen elektronik tersebut dengan melakukan pengiriman atau pemindahan terhadap pihak lain dipandang sebagai transaksi yang didasarkan kesepakatan para pihak yang menerima *Bitcoin* sebagai alat pembayaran.

³¹ Nadarajah, Asokan, *Op. Cit*, hlm 28

³² Gerungan, Carlo A, **Tanggungjawab Penyelenggara Sistem Informasi Jika Terjadi Kegagalan Sistem**, Vol.XXI,No.4,April-Juni 2013, hlm 49

2. Sifat Melawan Hukum dalam Penggunaan *Bitcoin*

Dalam Pasal 22 ayat (2) PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) menjelaskan:

“Dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik yang ditujukan untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat dipindahtangankan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus unik serta menjelaskan penguasaan dan kepemilikannya”³³

Berdasarkan pasal tersebut Sistem Informasi elektronik harus bersifat unik dan jelas penguasaan dan pemilikannya, meskipun kriptografi pada *Cryptocurrency* memastikan akses pada suatu alamat dompet virtual hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kunci privat namun sistem *Cryptocurrency* tidak menjelaskan identitas hukum dari pihak pemilik alamat dompet virtual tersebut (nama, domisili, alamat) sehingga kepemilikan atas suatu *Bitcoin* menjadi tidak jelas. Verifikasi transaksi *Bitcoin* dilakukan menggunakan tanda tangan digital, tanda tangan digital memiliki syarat sebagai berikut:³⁴

- a. B harus dapat memvalidasi tandatangan A pada pesan tersebut.
- b. Tandatangan A harus mustahil untuk dipalsukan oleh siapa pun.
- c. Dalam hal terjadi penolakan dari A atas tandatangannya tersebut maka harus dimungkinkan untuk Hakim atau pihak ketiga untuk memecahkan masalah tersebut.

Dengan tidak jelasnya identitas hukum dari pemilik suatu alamat pada *Bitcoin* sehingga tidak mungkin untuk memverifikasi tanda tangan tersebut selain

³³ Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012, *Pasal.22 ayat (2)*.

³⁴ *Ibid.*

itu pihak ketiga atau hakim tidak dapat memverifikasi tanda tangan digital dalam sistem *Cryptocurrency* sehingga sebuah tanda tangan elektronik tersebut sah ketika telah memenuhi syarat obyektif dan subyektifnya, syarat subyektif meliputi kualitas penanda tangan dan datum dalam tanda tangan tersebut hanya terkait pada data milik si penanda tangan, begitu juga dengan kuasa penanda tangan, mereka yang menandatangani dokumen elektronik haruslah mereka yang berkuasa atas data elektronik tersebut.

Sebuah tanda tangan elektronik baru dapat menjadi bukti suatu peristiwa hukum ketika dapat melaksanakan dua fungsi, yaitu sebagai identitas diri penanda tangan dan sebagai persetujuan hak dan kewajiban yang tercantum di dalamnya, untuk memenuhi syarat materiilnya tanda tangan digital harus dapat ditelusuri kembali.³⁵ Dengan tidak dapatnya Bitcoin untuk diverifikasi dan tidak jelasnya identitas hukum pemilik suatu alamat *Bitcoin* sehingga memungkinkan pengguna untuk menyangkal kepemilikannya atas suatu *Bitcoin* dan tidak dapat ditelusuri kembali maka ini membuat *Bitcoin* tidak memenuhi pasal 22 PP PSTE sehingga menimbulkan suatu pelanggaran hukum.

3. Syarat Sah Perjanjian pada Penggunaan *Bitcoin*

Perjanjian adalah salah satu sumber terjadinya perikatan. Akibat dari perikatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang saling mengikatkan diri. Perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

³⁵ Makarim, Edmon, **Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Hukum**, Rajagrafindo persada, Jakarta, 2010, hlm 123

Perdata dimana dalam pasal 1313 menjelaskan pengertian perjanjian adalah sebagai berikut:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, perjanjian menyebabkan terikatnya pihak satu dengan pihak lainnya, adanya perikatan tersebut menimbulkan kewajiban berupa prestasi dari satu pihak terhadap pihak lainnya yang berhak atas prestasi tersebut, dengan kata lain bahwa setiap perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak akan mengakibatkan kewajiban salah satu pihak untuk memenuhi prestasi dan pihak lain yang berhak menerima prestasi, namun memungkinkan juga untuk kedua belah pihak sama-sama harus memenuhi prestasi dan juga berhak atas prestasi.³⁶ Pada konsep seperti ini *Bitcoin* merupakan objek atau prestasi yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak, misalnya pihak A membeli baju melalui *e-commerce* dari pihak B dimana para pihak bersepakat untuk menjadikan *Bitcoin* sebagai alat transaksinya, prestasi yang diwajibkan untuk pihak A adalah pengiriman *Bitcoin* untuk mendapatkan prestasinya berupa baju dari pihak B. Dengan demikian *Bitcoin* dalam sebuah perjanjian merupakan suatu objek atau prestasi yang telah diperjanjikan oleh para pihak.

Abdul Kadir Muhammad membuat pengertian lain mengenai perjanjian yaitu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.³⁷ *Bitcoin* merupakan objek dari

³⁶ Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, **Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2008, hlm 92

³⁷ Muhammad, Abdulkadir, **Hukum Perdata Indonesia**. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 hlm 225

suatu perjanjian yang dilakukan oleh para penggunanya, dalam hal ini persetujuan terjadi oleh para pihak pengguna *Bitcoin* untuk saling mengikat diri dan bersepakat untuk menjadikan *Bitcoin* sebagai alat transaksinya. Sifat dari *Bitcoin* yang memiliki nilai yang bersifat ekonomis memasukan objek tersebut dalam lingkup harta kekayaan.

Perjanjian yang terbentuk agar dapat mengikat secara hukum dan mendapatkan perlindungan hukum maka harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang diatur dalam pasal 1320 KUH-Perdata, bahwa diperlukan empat syarat untuk memenuhi syarat sahnya perjanjian, diantaranya:

- a. Sepakat untuk mereka yang saling mengikat diri ;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- c. Suatu hal tertentu ;
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua mewakili syarat subjektif, yang dalam artian berhubungan dengan subjek atau para pihak dalam perjanjian. Syarat ketiga dan keempat berkaitan dengan syarat objektif yang terkait pada objek yang diperjanjikan dan disepakati untuk dilaksanakan sebagai prestasi oleh para pihak.³⁸ Prestasi tersebut harus dipenuhi oleh salah satu ataupun kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri.

3.1 Kesepakatan (*Toestemming*) Untuk Mereka Yang Saling Mengikatkan Diri

Kesepakatan merupakan suatu syarat subjektif dalam suatu perjanjian yang dapat menimbulkan akibat hukum bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan setiap

³⁸ Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, **Perikatan yang lahir dari Undang-Undang**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005, hlm 53

saat jika dimintakan pembatalannya, hal ini telah diatur dalam rumusan pasal 1446 hingga pasal 1450 KUH-Perdata, para pihak yang mengadakan perjanjian diwajibkan untuk terdapat kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak.

Kesepakatan sebagai perwujudan dari kehendak para pihak untuk melakukan perjanjian yang meliputi pelaksanaan perjanjian, cara melaksanakan, kapan dilaksanakan, siapa yang melaksanakan dan objek dari perjanjian yang dibuat. Dalam kaitannya pada *Bitcoin* kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam menunjuk objek dari suatu prestasi menggunakan opsi *Bitcoin*. Pada umumnya perjanjian dibuat oleh salah satu pihak terlebih dahulu sebagai bentuk penawaran mengenai objek guna pemenuhan suatu prestasi kepada pihak lain. Jika isi dari penawaran tersebut adalah kehendak yang disampaikan oleh salah satu pihak maka pihak lainnya harus bersepakat untuk menyetujui penawaran tersebut, sehingga jika kesepakatan para pihak dalam penggunaan *Bitcoin* sebagai alat transaksi atau pemenuhan prestasi telah disepakati maka syarat Kesepakatan (*toestemming*) telah terpenuhi dan dapat dilaksanakan perjanjian.

Umumnya sebelum para pihak bersepakat dalam suatu perjanjian terjadi yang dinamakan perundingan, yaitu penyesuaian kehendak antara para pihak untuk menemukan satu kehendak yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Perundingan yang dibuat harus bersifat bebas tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak mana pun, maka jika terjadi kekhilafan dalam perjanjian penggunaan *Bitcoin* sebagai objek pemenuhan prestasi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

3.2 Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Syarat subjektif berikutnya disamping kesepakatan merupakan kecakapan para pihak yang mengadakan perjanjian. Menurut hukum orang yang cakap adalah orang yang sudah dewasa dan memiliki pikiran sehat. Undang-undang mengatur mengenai kedewasaan seseorang dalam pasal 330 KUH-Perdata yaitu orang yang telah berumur 21 tahun atau telah menikah, begitu juga seseorang yang usianya belum genap 21 tahun namun sudah menikah maka orang tersebut dianggap telah dewasa dan cakap (*capable*) untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini adalah membuat perjanjian.³⁹ Cakap yang dimaksud menurut hukum adalah mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, baik untuk dirinya sendiri atau atas nama orang lain dalam kapasitasnya sebagai wali atau selaku pemegang kuasa dari pihak lain baik orang perorangan maupun badan hukum.

Selain menentukan siapa pihak yang cakap menurut hukum, KUH-Perdata juga mengatur tentang siapa saja pihak yang tidak cakap menurut hukum, secara eksplisit dijelaskan pada pasal 1330 KUH-Perdata orang-orang yang tidak cakap menurut hukum, yaitu :

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang untuk membuat perjanjian tertentu.⁴⁰

Basis dari sebuah *Bitcoin* adalah suatu teknologi yang diciptakan sebagai sistem yang menyerupai uang konvensional namun dalam bentuk digital. *Bitcoin*

³⁹ Satrio J, *Op.Cit*, hlm. 2.

⁴⁰ Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan maka perempuan tidak lagi termasuk orang yang tidak cakap hukum.

tidak memiliki lembaga yang bertindak sebagai pihak ketiga dalam mengatur, mengeluarkan dan mengelola peredaran *Bitcoin* yang beredar dalam masyarakat, begitu pula dengan subjek atau pengguna *Bitcoin* yang tidak dapat diketahui identitasnya, sehingga semua pihak baik perorangan maupun badan hukum dapat menggunakannya, baik yang menurut hukum telah cakap untuk bertindak dalam perjanjian maupun pihak yang belum memenuhi syarat kecakapan, sehingga terpenuhinya syarat kecakapan dalam penggunaan *Bitcoin* sangat relatif tergantung kepada penggunaannya. Pengguna *Bitcoin* yang telah cakap hukum dalam perjanjian maka dapat memenuhi syarat ini, namun pengguna *Bitcoin* yang belum cakap menurut hukum dalam suatu perjanjian memiliki akibat hukum dapat dibatalkan. Syarat ini adalah syarat subjektif yang berakibat perjanjian dapat dibatalkan namun tidak mutlak harus batal, sehingga perjanjian dapat saja untuk tetap dilanjutkan jika para pihak sama-sama bersepakat.

3.3 Suatu Hal Tertentu

Demi terwujudnya kepastian hukum maka dalam setiap perjanjian para pihak wajib untuk secara tegas dan jelas mencantumkan objek yang hendak diperjanjikan. Ketegasan tersebut memiliki arti bahwa objek yang diperjanjikan oleh para pihak harus dapat dihitung dan ditentukan jenisnya. Hal tersebut diatur dalam pasal 1333 KUH-Perdata yang menyatakan:

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Namun tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Atas dasar rumusan pada Pasal 1333 KUH-Perdata tersebut yang menjelaskan bahwa semua perjanjian pasti berkaitan dengan suatu keberadaan atas suatu kebendaan tertentu. Pada perjanjian untuk memenuhi prestasi, maka benda atau objek yang diperjanjikan tersebut harus dapat ditentukan secara pasti. Pada perjanjian untuk melakukan sesuatu, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal yang harus dilakukan oleh satu pihak dalam perjanjian tersebut pastilah juga berhubungan dengan suatu kebendaan tertentu, baik itu berupa kebendaan berwujud maupun tidak berwujud.⁴¹

Penentuan *Bitcoin* sebagai objek suatu perjanjian adalah pilihan yang dipilih oleh para pihak yang melakukan perjanjian sebagai wujud dari asa kebebasan berkontrak. Berdasarkan penjelasan sebelumnya yang diketahui bahwa *Bitcoin* lebih tepat dikategorikan sebagai benda dibanding sebagai mata uang karena sifat-sifatnya dan unsur-unsurnya. Melihat pada rumusan pasal 1333 KUH-Perdata maka bila *Bitcoin* dijadikan objek dari sebuah perjanjian maka harus dapat ditentukan jumlahnya secara pasti. *Bitcoin* yang merupakan sebuah sistem informasi yang bersifat digital membuat penentuan jumlah dari objek dapat ditentukan secara pasti berupa angka-angka bahkan sampai satuan terkecil.

Kemudian ditinjau berdasarkan Pasal 1332 KUH-Perdata, benda-benda yang dapat menjadi pokok perjanjian adalah benda-benda yang dapat diperdagangkan atau benda yang dapat dikategorikan dalam lapangan hukum harta kekayaan. Pasal 1332 KUH-Perdata tersebut menyatakan sebagai berikut :

“Hanya kebendaan yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian.”

⁴¹ Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, *op. cit.*, hlm 156

Benda-benda yang tidak termasuk dalam kategori hukum harta kekayaan, khususnya dalam Buku II KUH-Perdata tentang Kebendaan, tidak dapat dijadikan sebagai pokok perjanjian. Kepemilikan *Bitcoin* oleh para penggunanya digunakan sebagai alat transaksi pengganti uang konvensional dengan sistem seperti mata uang konvensional yang dapat diperdagangkan dalam transaksi barter antar orang perorangan maupun dalam bursa *Bitcoin*. Maka secara jelas *Bitcoin* merupakan kebendaan yang dalam lingkup hukum kekayaan.

3.4 Suatu Sebab Yang Halal

Disamping harus terpenuhinya syarat-syarat, demi sahnya perjanjian para pihak juga harus memuat alasan atau memenuhi unsur sebab yang halal dalam perjanjian. Pasal 1335 hingga 1337 KUH-Perdata mengatur mengenai sebab suatu perjanjian dikatakan halal. Pasal 1335 KUH-Perdata menyatakan:

“suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.”

Tidak dijelaskan secara lebih terperinci terkait pengertian sebab yang halal pada KUH-Perdata, namun pasal 1335 secara implisit menyatakan mengenai sebab yang halal meliputi:

- a. bukan tanpa sebab;
- b. bukan sebab yang palsu;
- c. bukan sebab yang terlarang.

Pada dasarnya hukum tidak memperhatikan alasan dari perbuatan subjek hukum saling mengikatkan diri pada suatu perjanjian, namun hukum hanya memperhatikan hal apa yang tertulis dan segala sesuatu yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1336 KUH-Perdata adalah sah dibuat para pihak selama tidak bertentangan dengan sebab-sebab yang dilarang,

sebab-sebab yang dimaksud selanjutnya dijelaskan pada Pasal 1337 KUH-Perdata yaitu suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Maksud dari pasal ini dimana Peraturan Perundang-undangan memiliki sifat untuk melindungi kepentingan umum, sehingga jika tidak sesuai dengan kepentingan umum dapat membahayakan kepentingan umum itu sendiri. Di Indonesia *Bitcoin* tidak diatur secara khusus melalui peraturan hukum, namun mengacu pada PP PTSE yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *Bitcoin* melanggar unsur rumusan pasal 22 ayat 2 UU PTSE yang berakibat pada suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat dengan menggunakan objek *Bitcoin* menjadi bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Akibat hukum yang ditimbulkan syarat pertama dan syarat kedua berbeda dengan syarat ketiga dan syarat keempat karena merupakan syarat obyektif yang berarti memiliki akibat hukum dimana perjanjian tersebut Batal Demi Hukum atau berarti tidak memiliki kekuatan hukum. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak menjadi tidak mengikat bagi para pihak bahkan sejak awal perjanjian itu dibuat. Akibat dari batal demi hukumnya sebuah perjanjian, menyebabkan salah satu atau kedua belah pihak kehilangan hak menuntut melalui Pengadilan untuk meminta penyelesaian sengketa. Hal ini menyebabkan perjanjian itu tidak melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak berdasarkan hukum.

Dengan demikian, dalam syarat sahnya suatu perjanjian sesuai yang diatur dalam pasal 1320 KUH-Perdata, syarat-syarat tersebut harus terpenuhi, dimana terdapat akibat hukum tersendiri bagi syarat subjektif yaitu dapat dibatalkan dan syarat objektif yaitu batal demi hukum atau tidak dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan pada penjelasan diatas maka meskipun *Bitcoin* dianggap sebagai mata uang oleh masyarakat namun keberadaannya tidak diakui oleh pemerintah sebagai mata uang secara hukum, maupun secara teori karena tidak memenuhi syarat kumulatif dari teori mata uang, sehingga jelas tidak sah sebagai alat pembayaran. *Bitcoin* sebagai alat transaksi dapat dianggap sebagai benda karena sifatnya dan dapat dikategorikan sebagai benda virtual yang tidak berwujud, sehingga pada praktiknya penggunaan *Bitcoin* cenderung bekerja seperti sistem transaksi barter yaitu sebagai alat tukar menukar.

Penggunaan *Bitcoin* mempunyai akibat hukum pada syarat sahnya suatu perjanjian dimana salah satunya yang merupakan syarat objektif yaitu kausa yang halal tidak di penuhi oleh *Bitcoin*. *Bitcoin* melanggar pasal 22 ayat 2 UU PTSE yang berakibat pada suatu perjanjian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.